

KEKALAHAN PDI-P DALAM PEMILUKADA KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2013

Raenaldy Yoga Pratama¹⁾, Bandiyah, S.Fil., MA²⁾, Tedi Erviantono, SIP., M.Si³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: Raenaldy.pratama@gmail.com¹, dyah_3981@yahoo.co.id², Erviantono@unud.ac.id

ABSTRACT

Political parties is a means or a place for the community to achieve power in government. One political party in Indonesia is still showing its existence until now is the PDI-P. Bali province is one of the strong base PDI-P. The power of PDI-P not only be seen in the central government in Bali but also in all regency in Bali. Klungkung regency is one of districts in Bali that showed the dominance of PDI-P. It can be seen with the victory of PDI-P in local elections and legislative elections. But in 2013, PDI-P was defeat in Klungkung elections. The purpose of this study was to determine and describe the defeat causes of PDI-P in Klungkung regency election in 2013. The theory used is the Theory of Symbolic Interaction with the approach changes the meaning of a symbol of a political party. This research method is descriptive qualitative. The results of this study found that, PDI-P defeat in the election of 2013 was influenced by internal and external causes. The determining candidates late from DPP PDI-P, less solid political machine PDI-P that does not fully support the decision of the DPP PDI-P, and there are cadres are disappointed because it failed to become a candidate recommended by the DPP followed by supporters who ultimately did not choose PDI-P became the main cause of the internal side. In external side the ownership of cooperative from other candidates, incompatibility of candidates that determined PDIP with community's desire, and and the emergence of issues discrimination another candidate that gave rise to fanaticism of regionalism is a major cause of the external side. In this study concluded that Klungkung society is now more pragmatism in selecting candidates such as see figure and vision and mission that brought in compare the political party in the election. Klungkung society will impose his choice to candidates who give benefit from the social economy only.

Keywords: Defeat, PDI-P, Symbolic Interaction

PENDAHULUAN

Partai politik merupakan sarana ataupun wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya dalam kekuasaan atau pemerintahan di suatu negara. Salah satu partai politik yang masih menunjukkan eksistensinya hingga kini adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Provinsi Bali sebagai salah satu basis masyarakat PDI-P. Hal ini tidak lepas karena adanya kedekatan dan kekuatan figur Soekarno dengan rakyat Bali. Soekarno sendiri merupakan keturunan asli Bali yang berasal

dari ibunya yang berasal dari Kabupaten Buleleng di Bali.

Dari pentas pemilu di tingkat daerah Bali pun PDI-P menunjukkan dominasinya dengan menduduki kursi orang nomor satu di Bali dari tahun 1998 hingga 2013. Pada Pemilihan Gubernur 1998 PDI-P dengan calon yang diusungnya Drs. Dewa Made Beratha berhasil mendapatkan dukungan terbanyak di DPRD Provinsi Bali untuk menjadi Gubernur Bali hingga dua periode, yakni dari periode 1998-2003 dan 2003 dan 2008. Setelah kemenangan dalam dua

periode tersebut, pada Pilgub 2008 kekuatan PDI-P di Bali juga masih terlihat dengan kembali terpilihnya Made Mangku Pastika dan AA. Puspayoga dari PDI-P sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Bali.

Kuatnya dominasi PDI-P atas Bali sendiri tidak hanya ditunjukkan pada perebutan kursi nomor satu di Bali saja, melainkan juga pada ranah yang lebih kecil seperti Kabupaten. Salah satu kabupaten yang menunjukkan dominasi PDI-P adalah Kabupaten Klungkung. Kekuatan PDI-P atas Klungkung. Ini dapat dilihat dari kemenangan partai ini pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2003-2008 dan 2008-2013. akan tetapi pada Pemilu Kabupatn Klungkung tahun 2013 sendiri tidak berbanding lurus dengan realitas yang ada. Pasangan calon yang diusung PDI-P kalah dalam Pemilu Kabupatn Klungkung tahun 2013.

Partai Politik

Pada era reformasi seperti saat ini partai politik tidak lagi menjadi sesuatu yang langka untuk dilihat di Indonesia. Pembatasan jumlah partai politik yang dilakukan pada saat Orde Baru tidak lagi terjadi pada kontelasi politik negara ini. Secara umum partai politik diartikan sebagai sebuah kelompok masyarakat yang berusaha masuk jalur kekuasaan di dalam pemerintahan.

Maka dari itu penulis dapat menyimpulkan bahwa partai politik sebenarnya merupakan gabungan kelompok masyarakat yang memiliki tujuan yang sama dalam menguasai pemerintahan suatu negara dengan cara memberikan dominasinya atas kelompok-kelompok lain melalui kekuasaan yang dimilikinya.

PDI-P di Bali

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merupakan salah satu partai politik yang ada di Indonesia. Partai ini didirikan pada tanggal 10 Januari 1999 oleh Megawati Soekarnoputri. Dalam pentas politik di Klungkung PDI-P merupakan partai kuat. Ini dibuktikan dengan kemenangan dalam dua pilkada edisi terakhir yaitu pilkada tahun 2003 dan pemilu kabupatn tahun 2008.

Tidak hanya dalam pemilu kabupatn, PDI-P juga merupakan partai yang memperoleh jumlah kursi terbanyak di Kabupaten Klungkung dalam dua periode terakhir, yakni pada pemilihan legislatif tahun 2004 dan 2009.

Akan tetapi dalam realitas pemilu kabupatn Klungkung tahun 2013 PDI-P kekuatan PDI-P mengalami penurunan yang signifikan yang ditandai dengan Kekalahan PDI-P saat itu. Kekalahan PDI-P di Kabupaten Klungkung tentunya memiliki penyebab-penyebab yang mengakibatkan, hal inilah yang mendorong peneliti ingin mengkaji maupun meneliti mengenai penyebab Kekalahan PDI-P dalam pemilu kabupatn Klungkung tahun 2013.

Pemilukada

Dalam era reformasi seperti saat ini sifat dan cara Pemilihan Kepala Daerah yang sentralistik kini sudah tidak digunakan. Karena pada sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia kini sudah menjunjung tinggi asas demokrasi. Dalam asas demokrasi ini rakyat dipandang memiliki porsi yang lebih banyak dalam menentukan pemimpin yang dikehendaki. Masyarakat kini diasumsikan sebagai aktor penting dalam proses pemilihan yang ada.

Selain itu dalam era reformasi sekarang ini pemilu kabupatn juga dipandang sebagai upaya demokrasi untuk mencari pimpinan daerah yang berkualitas dengan cara-cara yang damai, jujur dan adil. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait masalah Pemilu kabupatn terdapat dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah "Bahwa pelaksanaan pilkada langsung pada hakikatnya tidak hanya untuk tujuan mengoptimalkan demokratisasi di daerah, melainkan merupakan perwujudan dari prinsip otonomi daerah seluas-luasnya". Dan pasal 56 ayat 1 UU No. 32 tahun 2004 berbunyi "Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil".

INTERAKSI SIMBOLIK

Secara perspektif, interaksi simbolik dapat diartikan juga sebagai interaksi yang terjadi antar-individu yang berkembang melalui simbol-simbol yang mereka ciptakan. Munculnya simbol PDI-P sebagai wujud partai masyarakat Bali merupakan sebuah bentuk dari adanya interaksi simbolik yang tercipta di dalam tubuh masyarakat Bali sendiri. Adanya kedekatan historis yang menunjukkan bahwa Bali merupakan daerah basis partai PDI-P yang syarat akan perjuangan menunjukkan adanya interaksi simbolik antar partai dengan masyarakat. Kedekatan antar figur penting partai dengan masyarakat Bali juga menambah lekat dan kuatnya simbol yang ada. Figur Partai PDI-P yang masih memiliki hubungan garis keturunan yang sama dengan masyarakat Bali tentu menjadi daya tarik lebih terhadap masyarakat dalam memberikan dukungannya..

Dalam bukunya Ritzer (1992:209) juga menyatakan bahwa teori interaksionisme simbolik mengandung beberapa prinsip dasar sebagai berikut:

- a. Manusia tidak seperti binatang yang lebih rendah, karena manusia dikarunia kapasitas berpikir
- b. Kapasitas berpikir tersebut terbentuk oleh adanya interaksi sosial.
- c. Dalam interaksi sosial, manusia mempelajari arti simbol-simbol yang memungkinkan mereka menggunakan kemampuan khusus untuk berpikir.
- d. Makna-makna dan simbol-simbol memungkinkan manusia secara khusus membedakan aksi dan interaksi.
- e. Manusia dapat mengubah makna-makna dan simbol-simbol yang mereka gunakan dalam aksi dan interaksi berdasarkan interpretasi mereka terhadap situasi tertentu,
- f. Manusia dapat membuat modifikasi dan perubahan-perubahan karena kemampuan mereka berinteraksi dengan diri mereka sendiri, yang memungkinkan mereka menguji aksi yang mana yang mungkin dapat dijalankan, menilai kerugian dan keuntungan, serta memilih salah satunya,
- g. Pola-pola aksi dan interaksi yang telah jalin menjalin membentuk kelompok-kelompok dan masyarakat.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini juga menjelaskan, mendeskripsikan, menyelidiki dan memahami secara menyeluruh tentang penyebab-penyebab kekalahan PDI-P dalam pemilukada Kabupaten Klungkung tahun 2013. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumen. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampling yakni *purposive sampling*. Penelitian ini berlokasi Kabupaten Klungkung Provinsi Bali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Klungkung merupakan salah satu kabupaten diantara 8 Kabupaten dan kota yang ada di Bali selain Badung, Bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana, Karangasem, Tabanan dan Kota Denpasar. Letak astronomisnya terletak di antara 115o 21'28" – 115o 37'43" Bujur Timur dan 8o 27'37" – 8o 49'00" Lintang Selatan, dengan batas-batas, sebelah Utara Kabupaten Bangli, sebelah Timur Kabupaten Karangasem, sebelah barat Kabupaten Gianyar dan sebelah Selatan Samudra Hindia.

Luas wilayah Kabupaten Klungkung mencapai 315 Km² dan merupakan Kabupaten dengan luas wilayah terkecil di provinsi Bali. Kabupaten Klungkung terdiri dari 4 kecamatan yaitu, Kecamatan Klungkung, Dawan, Banjarangkan dan Nusa Penida.

PDI-P merupakan partai yang kuat dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Klungkung. Munculnya PDI-P sebagai partai yang kuat di Klungkung berawal dengan runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998. Hal ini dapat dilihat dengan kemenangan partai berlambang banteng ini dalam pemilihan legislatif dan pemilukada di

Kabupaten Klungkung mulai dari pemilihan kepala daerah 2003 dan 2008 serta pemilihan legislatif 2004-2009.

Dalam pemilukada Kabupaten Klungkung edisi terbaru yang dilaksanakan tanggal 23 agustus tahun 2013 terjadi kejutan dengan kekalahan PDI-P dalam perebutan kursi orang nomor satu di Klungkung, dimana terjadi penurunan suara PDI-P dari urutan nomor satu ke-urutan nomor tiga dalam pemilukada. Kekalahan PDI-P pada saat itu dipengaruhi oleh penyebab dari sisi internal dan eksternal.

Berdasarkan hasil temuan penelitian, simbol politik PDI-P di Kabupaten Klungkung kini sudah mulai memudar dan menurun pasca kekalahan partai ini dalam pemilukada tahun 2013. Partai di Kabupaten Klungkung kini tidak lagi dijadikan opsi utama dalam pemilihan kepala daerah. Masyarakat Klungkung sudah mulai sadar dan mengalami fenomena melek politik dalam menentukan pilihannya. Figur dirasa jauh lebih penting untuk dinilai sebagai pilihan daripada partai politik yang mengusung, walaupun masih terdapat juga masyarakat yang memilih berdasarkan partai tertentu.

Selain penilaian figur, perubahan makna simbol PDI-P di Kabupaten Klungkung sebagai partai yang dominan dipilih masyarakat disebabkan oleh adanya masalah internal yang kuat dalam tubuh partai ini yang menyebabkan masyarakat pun ragu untuk menjatuhkan pilihannya terhadap PDI-P. Penetapan calon yang paling akhir dari calon lainnya dalam pemilukada jelas menimbulkan sosialisasi maupun kampanye politik yang terlambat. Masyarakat jelas akan lebih menjatuhkan pilihannya kepada calon maupun partai yang lebih dahulu mendekatinya dan menyampaikan visi misi yang akan dijalankan.

Hasil temuan penelitian, simbol politik PDI-P di Kabupaten Klungkung kini sudah mulai memudar dan menurun pasca kekalahan partai ini dalam pemilukada tahun 2013. Partai di Kabupaten Klungkung kini tidak lagi dijadikan opsi utama dalam pemilihan kepala daerah. Masyarakat Klungkung sudah mulai sadar dan mengalami fenomena melek politik dalam menentukan pilihannya. Figur dirasa jauh lebih penting untuk dinilai sebagai pilihan daripada partai politik yang mengusung,

walaupun masih terdapat juga masyarakat yang memilih berdasarkan partai tertentu.

Selain penilaian figur, perubahan makna simbol PDI-P di Kabupaten Klungkung sebagai partai yang dominan dipilih masyarakat disebabkan oleh adanya masalah internal yang kuat dalam tubuh partai ini yang menyebabkan masyarakat pun ragu untuk menjatuhkan pilihannya terhadap PDI-P. Penetapan calon yang paling akhir dari calon lainnya dalam pemilukada jelas menimbulkan sosialisasi maupun kampanye politik yang terlambat. Masyarakat jelas akan lebih menjatuhkan pilihannya kepada calon maupun partai yang lebih dahulu mendekatinya dan menyampaikan visi misi yang akan dijalankan.

Berdasarkan hasil temuan penelitian, kekalahan PDI-P pada saat itu juga dipengaruhi oleh pengaruh eksternal, figur calon yang diusung partai lain saat itu yang membawa dan memiliki gerbong pemilih yang kuat. Pasangan nomor urut 4 I Nyoman Suwirta merupakan seorang penggegas dan tokoh sentral di KOPPAS SRINADI Klungkung yang memiliki banyak anggota, pekerja dan karyawan.

Dalam sistem pelaksanaannya sendiri koperasi jelas memiliki kedekatan yang lebih intim dengan sesama anggotanya. Faktor kedekatan ini tentunya memberikan implikasi terhadap pilihan anggotanya dalam pemilukada Kabupaten Klungkung tahun 2013 kepada pasangan calon nomor urut 4 ini. Selain itu adanya kedekatan secara sosial ekonomi juga mempengaruhi, masyarakat yang bekerja di KOPPAS SRINADI pada saat itu jelas akan lebih menjatuhkan pilihannya kepada pasangan calon nomor urut 4 daripada PDI-P, walaupun mereka merupakan simpatisan PDI-P. Pengaruh dari adanya kebutuhan masyarakat dalam keberlangsungan kehidupannya secara sosial ekonomi tentunya akan lebih menjadi pilihan utama untuk digunakan masyarakat saat itu.

Penyebab lain dari kekalahan PDI-P saat itu dikarenakan oleh munculnya isu politik mengenai diskriminasi terhadap Calon Bupati nomor urut 4 I Nyoman Suwirta yang dikatakan sebagai panjak (pelayan/buruh) di Puri Klungkung dulunya yang menyebabkan beliau tidak layak memangku jabatan sebagai Bupati Klungkung saat itu. Munculnya isu ini

pada akhirnya menciptakan fanatisme kedaerahan masyarakat Nusa Penida yang tidak terima calon dari daerahnya dihina. Hal ini menyebabkan rasa belas kasih masyarakat Nusa Penida yang berujung pada bersatunya suara Nusa Penida dalam mendukung calon nomor urut 4 pada pemilukada Kabupaetn Klungkung tahun 2013 saat itu.

KESIMPULAN

Kekalahan PDI-P dalam pemilukada tahun 2013 merupakan kejutan dalam kontelasi politik di Kabupaten Klungkung. PDI-P sendiri merupakan partai yang mendominasi dalam pemilukada maupun pileg di Kabupaten Klungkung, mulai pileg 1999, 2004, 2009 pilkada 2003 dan pemilukada 2008. Kekalahan PDI-P pada pemilukada tahun 2013 menunjukkan adanya perubahan makna simbol politik yang ada dan selama ini berjalan. Perubahan makna simbol politik dalam kekalahan PDI-P tahun 2013 itu dipengaruhi oleh:

Pertama, adanya masalah internal yang kuat dalam tubuh partai PDI-P. Penentuan bakal calon yang terlambat oleh DPP PDI-P saat itu menjadi penyebab utama kekalahan partai berlambang banteng ini. Calon yang akhirnya dikeluarkan DPP PDI-P pun tidak seperti harapan simpatisan, pendukung PDI-P di Kabupaten Klungkung. Selain itu adanya kekecewaan dari kader partai PDI-P yang tidak mendapat rekomendasi dari DPP PDI-P untuk menjadi calon Bupati Klungkung ada saat itu yang diikuti oleh simpatisan, konstituen, pendukungnya yang tidak memberikan pilihannya pada PDI-P pada saat itu. Hal inilah mengakibatkan terjadinya penurunan suara maupun elektabilitas PDI-P pada pemilukada tahun 2013.

Kedua, munculnya isu politik dalam pemilukada Kabupaten Klungkung tahun 2013. Isu politik ini mengenai diskriminasi terhadap pasangan calon nomor urut 4 I Nyoman Suwirta-I Made Kasta yang disebut sebagai bekas panjak (pelayan/buruh) yang tidak layak memangku jabatan sebagai Bupati Klungkung saat itu. Diskriminasi terhadap pasangan calon nomor urut 4 ini menimbulkan adanya rasa fanatisme

kedaerahan masyarakat Nusa Penida yang tidak terima calon dari daerahnya dihina. Hal ini sendiri juga menyebabkan adanya rasa belas kasih dari masyarakat Nusa Penida yang akhirnya bersatu dan memberkian dukungannya secara penuh terhadap calon nomor urut 4 yang pada akhirnya menyebabkan tergerusnya suara PDI-P di Nusa Penida dari 8.171 suara pada pemilukada 2008 menjadi 4.835 suara pada pemilukada tahun 2013.

Ketiga, adanya pragmatisme masyarakat Kabupaten Klungkung yang mengalami kejenuhan dalam memilih calon dari partai yang sama. Pragmatisme ini juga dipengaruhi oleh adanya kekecewaan masyarakat terhadap kepemimpinan PDI-P sebelumnya yang dirasa tidak berjalan efektif. Pragmatisme dan kejenuhan ini pada akhirnya memunculkan fenomena kesadaran atau melek politik dalam masyarakat Kabupaten Klungkung dalam menentukan pilihannya. Masyarakat yang biasanya melihat dan memilih berdasarkan partai politiknya (PDI-P), kini lebih memandang figur calon yang diusung sebagai opsi utama dalam memberikan pilihannya. Figur calon yang lebih dulu melakukan sosialisasi dan memaparkan visi misinya kini menjadi nilai lebih dan utama dalam masyarakat Kabupaten Klungkung untuk memberikan suara dan pilihannya.

DAFTAR PUSTAKA:

Buku

Aminah, Siti. (2014). Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal. Jakarta; Kencana Prenadamedia Group.

Bendix, Reinhard. (1960). Max Weber. AN Intellectual Portrait. Garden city. New York; Double-day & Company

Budiardjo, Miriam. (2007). Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi Ketiga. Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama.

Budiardjo, Miriam. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi Keempat. Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama.

- Budiardjo, Miriam. (2010). *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi Kelima*. Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, Burhan. (2001). *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif Surabaya*; Airlangga University Press.
- Daniel Bell. (1960). *The end Of Ideology: On The Exhaustion Of Political Ideal In The Fifties*. New York; Free Press.
- Effendy. Onong Uchjana. (1989). *Kamus Komunikasi Halaman 352*. Bandung; PT. Mandar Maju.
- F.W Dillistone (2002). *Daya Kekuatan Simbol (The Power of Symbols) Edisi Pemikiran-Filsafat*. Yogyakarta; Kanisius.
- Harry Eckstein & David E. Apter. (1963). *A Comparative Method For Study of Politics in Comparative Politics*. London; The Free Press of Glencoe
- Husain Usman & Purnomo Setiady Akhbar. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta; PT. Bumi Aksara.
- Koirudin. (2005). *Menuju Partai Advokasi Edisi Cetakan Pertama*. LKiS Yogyakarta; Pustaka Tokoh Bangsa.
- Moelong. Levxy J. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung; PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. (2003). *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung; Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. (2008). *Komunikasi Massa (Kontroversi, Teori Dan Aplikasi)*. Bandung; Widya Padjadjaran.
- Raho, Bernard SVD. (2007). *Teori Sosiologi Modern Cetakan Pertama*. Jakarta; Prestasi Pustaka.
- Richard, West & Turner, H, Linn. (2008). *Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi*. Jakarta; Salemba Humanika.
- Ritzer, George. (2003). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta; RajaGrafindo Persada.
- Ritzer, George & Douglas J. Goodman. (2004). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta; Prenada Media Group.
- Roger F. Soltau. (1961). *An Introduction to Politics Longmans*. London; Green And Co.
- Rudini, H. (1994). *Atas Nama Demokrasi Indonesia*. Yogyakarta; BIGRAF Publishing.
- Subakti, Ramlan. (2010). *Memahami Ilmu Politik Cetakan Ketujuh*. Jakarta; PT. Grasindo.
- Sugiono. (2007). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung; ALFABETA.
- Suprpto, Riyadi. (2002). *Interaksionisme Simbolik, Perspektif Sosiologi Modern*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Supriyanto, Didik. (2008). *Peraturan Pemilihan Kepala Daerah*. Jakarta; Pustaka Mina.
- Wirawan, I.B. (2012). *Teori-teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. Jakarta; Prenadamedia Group.
- Skripsi
- Lubis, Khairunnisa. 2014. "Eksistensi partai Golkar Dalam Politik Lokal: Studi Kasus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Simalungun Tahun 2004-2009". (Skripsi) Program Studi Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Diakses dari <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/24162> 28 Maret 2016, pukul 15:23 WITA.
- Saliman, Farhan. 2015. "Faktor-Faktor Dibalik Kekalahan Cagub/Cawagub Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pada Pilgub DKI Jakarta 2012". (Skripsi) Program Studi Jinayah Siyash Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Diakses dari <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30378> 28 Maret 2016 pukul 16:25 WITA.
- Alamsyah, Dedi. 2010. "Kekalahan Partai Golkar Pada Pemilu Di Kabupaten

Toraja Utara 2010". (Skripsi) Program Studi Ilmu Politik Universitas Hasanudin.Makassar.Diakses dari repository.unhas.ac.id 28 Maret 2016 2016 pukul 19:47 WITA.

Web

<http://news.liputan6.com/read/75500/kisah-sukses-parpol-baru-di-pemilu-1999>, diakses 18 Maret 2016 Pukul 10:57 WITA

<http://news.okezone.com/read/2008/07/16/1/128025/pastika-ditetapkan-sebagai-pemenang-pilgub-bali>, diakses 21 Maret 2016 pukul 13:37 WITA

<http://www.kpu-klungkungkab.go.id/index.php/detailbankdata/?act=folder&i=21>, diakses 15 April 2016 pukul 20:34 WITA

<http://ppid.kpu.go.id/?idkpu=5105&idmenu=in-fosetiapsaat>, diakses 15 April 2016 pukul 21:21 WITA

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.